



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3511505, FAKSIMILE (021) 3511486, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : Und - 84 /PK/2017
Sifat : Segera
Hal : Undangan Workshop .

10 November 2017

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
(terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Tahun Anggaran 2018, kami bermaksud untuk menyelenggarakan **Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2018**. Tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah agar: (1) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dapat disusun dan ditetapkan secara tepat waktu, mengingat peraturan dimaksud merupakan salah satu syarat penyaluran Dana Desa; (2) penyampaian pokok-pokok yang perlu dimuat dalam peraturan bupati/walikota dimaksud agar selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan (3) pemberian asistensi penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa berdasarkan pagu Dana Desa pada APBN TA 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta bantuan Saudara untuk menunjuk 3 (tiga) orang pejabat/pegawai dari unit yang menangani bidang keuangan, pemerintahan/pemberdayaan masyarakat desa, dan *legal drafting* peraturan daerah, agar dapat hadir pada workshop yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin-Selasa, 20-21 November 2017
(jadwal per Kabupaten/Kota terlampir)

Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya No.73-81, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, 10450

Penyelenggaraan workshop tersebut tidak dipungut biaya. Panitia menyediakan konsumsi selama kegiatan berlangsung, sedangkan akomodasi dan transportasi dibebankan kepada anggaran perjalanan dinas masing-masing daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Boediarso Teguh Widodo
NIP-19580823 198210 1 001

Jadwal Acara

Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2018

Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya No.73-81, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, 10450

Waktu	Acara	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 08.45	Laporan Panitia	Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
08.45 – 09.30	<i>Keynote Speech</i> dan Pembukaan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
09.30 – 09.40	<i>Coffee Break</i>	
Pemaparan Materi Secara Panel		
09.40 – 11.40	Materi I : Kebijakan Dana Desa TA 2018	Kemenkeu
	Materi II : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pokok-Pokok Muatan Revisi Permendagri 113 Tahun 2014	Kemendagri
	Materi III : Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018	Kemendes dan PDT
11.40 – 12.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.45 – 13.30	ISHOMA	
Peserta Dibagi ke Dalam Kelompok/Kelas		
13.30 – 15.00	Pokok Muatan Peraturan Bupati/Walikota dan Bimbingan Penghitungan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none">• Instruktur• Peserta membawa perlengkapan laptop
15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>	
15.15 – 16.30	Lanjutan (Bimbingan Penghitungan Dana Desa)	<ul style="list-style-type: none">• Instruktur• Peserta membawa perlengkapan laptop
16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

Mohon perhatian:

1. Untuk mendukung pelaksanaan acara, mohon dapat melakukan konfirmasi kehadiran melalui email ke subditdok.djpk@gmail.com atau telepon ke 021-3511505, Sdr. Dastam (0812 9055 594)
2. Panitia tidak menanggung transportasi dan akomodasi selama acara berlangsung.
3. Peserta workshop agar membawa laptop dan media pemindah data (*flashdisk*).

Lampiran

Nomor : Und-84 /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Bangka Belitung	
1	Kab. Bangka
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Belitung
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Bangka Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Bangka Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Bangka Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Belitung Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi	
1	Kab. Batang Hari
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Bungo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Kerinci
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Merangin
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Muaro Jambi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Sarolangun
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Tanjung Jabung Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Tanjung Jabung Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Tebo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kota Sungai Penuh
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Bengkulu	
1	Kab. Bengkulu Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Bengkulu Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Rejang Lebong
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Kaur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Seluma
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Mukomuko
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Lebong
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Kepahiang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Bengkulu Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~04~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Lampung	
1	Kab. Lampung Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Lampung Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Lampung Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Lampung Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Lampung Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Tanggamus
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Tulang Bawang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Way Kanan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Pesawaran
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Pringsewu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Mesuji
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Tulang Bawang Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Pesisir Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Provinsi DIY	
1	Kab. Bantul
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Gunung Kidul
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Kulon Progo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Sleman
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi NTB	
1	Kab. Bima
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Dompu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Lombok Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Lombok Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Lombok Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Sumbawa
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Sumbawa Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Lombok Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-84 /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah	
1	Kab. Banjarnegara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Banyumas
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Batang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Blora
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Boyolali
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Brebes
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Cilacap
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Demak
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Grobogan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Jepara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Karanganyar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Kebumen
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Kendal
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Klaten
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kab. Kudus
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
16	Kab. Magelang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
17	Kab. Pati
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
18	Kab. Pekalongan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
19	Kab. Pemalang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
20	Kab. Purbalingga
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
21	Kab. Purworejo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
22	Kab. Rembang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
23	Kab. Semarang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
24	Kab. Sragen
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
25	Kab. Sukoharjo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
26	Kab. Tegal
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
27	Kab. Temanggung
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
28	Kab. Wonogiri
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
29	Kab. Wonosobo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~84~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Selatan	
1	Kab. Banjar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Barito Kuala
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Hulu Sungai Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Hulu Sungai Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Hulu Sungai Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Kotabaru
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Tabalong
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Tanah Laut
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Tapin
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Balangan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Tanah Bumbu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Provinsi Kalimantan Tengah	
1	Kab. Barito Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Barito Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Kapuas
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Kotawaringin Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Kotawaringin Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Katingan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Seruyan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Sukamara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
9	Kab. Lamandau
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Gunung Mas
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
11	Kab. Pulang Pisau
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Murung Raya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Barito Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum